

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Fenomena paling menarik dari suatu negara yang kaya akan etnis adalah terjadinya konflik-konflik internal (intra-state conflict). Kekayaan etnis suatu negara bisa menjadi salah satu faktor yang paling dominan yang menyebabkan timbulnya disintegrasi yang akhirnya melahirkan konflik ethno-nasional. Konflik ethno-nasional merupakan konflik dimana pihak-pihak yang terlibat mendefinisikan dirinya dengan menggunakan criteria komunal dan mengemukakan tuntutan-tuntutan atas nama kepentingan kolektif kelompoknya terhadap negara, atau terhadap actor komunal lainnya. Konflik ini biasanya melibatkan gerakan-gerakan “*irredentist*” (pencaplokan), “*secessionist*” (pemisahan), atau anti colonial. Ada tiga criteria yang menjadi dasar konflik ethno, antara lain : (1) konflik itu terjadi di dalam batas-batas wilayah suatu negara; (2) salah satu pihak yang berkonflik adalah pemerintah yang sedang berkuasa; (3) pihak oposisi mampu memberikan perlawanan yang terus menerus.¹

Konflik ethno-nasional yang tidak memenuhi kriteria diatas dapat dianggap sebagai kekerasan komunal (communal violence) dan perang internal wilayah. Dalam

¹ [Http://hikmat.atspace.org/arsip/mini_kata/tulisan/weber.html](http://hikmat.atspace.org/arsip/mini_kata/tulisan/weber.html), *Kerangka Teoritis Penyelesaian Konflik* oleh El Fatih A. Abdel Salam, Associate Professor, Departemen of Political Sciences, Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences Internasional Islamic, University Kualalumpur, Malaysia, diakses tanggal 15 April 2007

hal ini konflik intra state dibagi ke dalam kelompok-kelompok berbasis etnis, agama, dan ideologi. Kelompok-kelompok ini kira-kira berhubungan dengan apa yang disebut dengan “*ethno-nasionalism*” (nasionalisme etnis). Semenjak Perang Dunia II telah banyak konflik intra state yang terjadi di berbagai negara, misalnya Korea, Vietnam, Pakistan, Afganistan, Cyprus, Lebanon, Irak, Rwanda, bekas Uni Soviet dan Yugoslavia, dan lain-lain. Biasanya konflik etnis berkobar di sebagian negara-negara miskin yang akibatnya semakin memperparah kemiskinan negara-negara tersebut dikarenakan hancurnya basis-basis ekonomi yang pada dasarnya memang telah rapuh dan akhirnya menimbulkan penderitaan berkepanjangan terhadap generasi demi generasi. Selain itu, konflik etno-politis yang meluas dapat mengancam keamanan dan perdamaian dunia, karenanya metode-metode yang dipakai guna menghindarkan ataupun menyelesaikannya secara damai merupakan suatu hal keniscayaan.² Sebagaimana dijelaskan diatas, konflik etno-nasionalis atau konflik etno-politis biasanya terjadi di negara-negara miskin, tetapi konflik itu pun terjadi di Rusia yang merupakan salah satu negara besar. Kondisi masyarakat Rusia yang sangat multiethnis berpotensi besar menimbulkan ancaman disintegrasi di republik-republik Federasi Rusia. Terlebih setelah jatuhnya Uni Soviet, konflik-konflik yang selama ini tersembunyi mencuat ke atas permukaan. Berbagai gerakan separatis bermunculan dan mulai mengancam integritas wilayah Rusia, salah satunya konflik Chechnya.

² ibid

Konflik Chechnya merupakan satu contoh dari gerakan separatisme dimana simbol-simbol agama dan etnis menjadi bagian integral dari gerakan tersebut. Konflik antara Rusia-Chechnya sebenarnya telah dimulai semenjak abad IX sampai dengan abad XII, hanya saja mulai semakin menarik semenjak runtuhnya imperium Uni Soviet. Ada berbagai motivasi yang menjadi alasan mengapa konflik tersebut bisa terjadi. Selain motivasi politik, ekonomi, dan juga ideologi, adanya dendam lama bangsa Chechen terhadap tindakan politik dan militer yang dilakukan oleh pemerintah Rusia lama (Uni Soviet) menjadi alasan dasar bangsa Chechen untuk bangkit melawan. Misalnya, kebijakan Uni Soviet untuk melakukan pembersihan etnis dan memindahkan bangsa Chechen secara paksa ke berbagai penjuru Asia Tengah, termasuk ke Siberia yang menyebabkan kematian seperempat populasi Chechnya.

Konflik tersebut semakin memanas saat pemerintahan lokal Chechnya menyatakan kemerdekaannya terkait dengan jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. pernyataan kemerdekaan tersebut menjadi pemicu awal serangan Rusia terhadap Chechnya yang dimulai pada tahun 1994. Perang yang dikenal dengan Perang Chechnya pertama ini berlangsung sejak tahun 1994 sampai 1996 dengan kekalahan telak di pihak Rusia. Setelah kekalahan Kremlin tersebut, Chechnya secara de facto memperoleh kemerdekaan meski kalangan internasional tidak mengakuinya sebagai negara berdaulat.

Gerakan separatis Chechnya yang dipimpin oleh Aslan Maskhadov dan pemerintah Moskow akhirnya sepakat untuk berdamai dan membahas status

Chechnya dimasa mendatang. Selama 3 tahun sebelum meletusnya Perang Chechnya kedua, Chechnya mengalami masa tenang. Tetapi, pada akhir millennium II, tepatnya tahun 1999, Rusia melancarkan serangan udara terhadap Chechnya dengan alasan gagalnya Maskhadov mengendalikan kelompok Basayev dan sejak saat itu dimulailah perang Chechnya kedua. Konflik tersebut menyebabkan banyaknya penduduk sipil yang tewas akibat agresi Rusia tersebut, dan meskipun dikecam oleh dunia internasional karena melakukan pelanggaran HAM, Rusia tetap melanjutkan aksi militernya terhadap Chechnya. Sampai saat ini, berbagai usaha perdamaian yang diprakarsai organisasi Internasional tidak kunjung membuahkan hasil. Rusia tetap memilih jalur militer guna menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung selama kurang lebih 400 tahun tersebut. Kebijakan represif melalui jalur-jalur kekerasan yang cenderung dipilih Pemerintah Rusia dalam menghadapi gerakan separatis Chechnya menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.

B. Tujuan Penulisan

Secara garis besar tujuan penulisan ini lebih diutamakan pada kecenderungan kebijakan represif yang lebih dipilih Rusia dalam menghadapi gerakan separatis Chechnya. Namun, agar lebih terperinci, tujuan penulisan ini difokuskan pada :

1. Memahami dinamika hubungan Rusia – Chechnya, yang dibagi menjadi tiga masa yaitu masa Kekaisaran Rusia Raya, Pemerintahan Uni Soviet dan Pemerintahan Federasi Rusia

2. Mengetahui dan memahami jalan penyelesaian terhadap konflik Chechnya termasuk latar belakang yang mempengaruhi Rusia memilih menerapkan kebijakan yang sangat represif dalam menghadapi gerakan separatis Chechnya
3. Untuk membuktikan hipotesa yang telah disusun dalam tulisan ini

C. Latar Belakang Masalah

Keruntuhan Uni Soviet di tahun 1991 telah mewariskan berbagai masalah nasional bagi negara-negara bagian bekas negara adidaya tersebut. Dan permasalahan yang lebih kompleks lebih dirasakan oleh Rusia yang merupakan bagian terbesar dari Uni Soviet, dibandingkan dengan republik-republik Uni Soviet lainnya. Pluralisme masyarakat yang mendiami Federasi Rusia lebih berpotensi menimbulkan disintegrasi, jika perangkat federal yang merupakan penyatu elemen-elemen masyarakat yang multietnis tidak berfungsi dengan baik. Terlebih proses transisi perubahan RSFSR (Republik Soviet Sosialis Federasi Rusia)³ menjadi Federasi Rusia menyisakan persoalan yang kapan pun bisa menjadi bom waktu di masa mendatang. Gerakan separatisme yang muncul dengan memanfaatkan sentimen etnis, agama maupun ketidakadilan bisa timbul kapan pun di republik-kesukuan yang ada di Rusia, salah satunya adalah konflik Chechnya.

Konflik Chechnya sebenarnya bukanlah sesuatu hal baru, melainkan konflik lama yang telah berlangsung selama 300 tahun lebih, yang dimulai ketika wilayah

³ RSFSR diresmikan dalam Sidang III Dewan Pekerja, Militer, dan Petani di Petrograd pada Januari 1918, pasca Revolusi Bolshevick yang dilakukan oleh kaum Bolshevick yang juga menyebabkan perubahan struktur pemerintahan Monarki kearah sosialisme dalam bentuk Diktatur Ploretariat. Lebih lanjut lihat: A.Fahrurodji, *Rusia Baru Menuju Demokrasi; Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) hal.125-132

Kaukasus ditaklukkan oleh Kekaisaran Rusia. Pada mulanya, wilayah Kaukasus bukanlah wilayah Rusia melainkan wilayah yang termasuk dalam daulah Islam yang ditundukkan pada masa kekhalifahan Ustman Bin Affan, sehingga sebagian besar penduduk wilayah tersebut beragama Islam.⁴ Baru pada abad 19, ketika Rusia berhasil menundukkan wilayah Kaukasus, Chechnya dikuasai dan menjadi salah satu republik dibawah imperium Rusia. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa gerakan pembebasan bangsa Chechen telah dimulai sejak abad 9 sampai abad 14. Gerakan pembebasan itu pertama kali dipimpin oleh Imam Mansyur pada tahun 1785 hingga 1791. Gerakan pembebasan tersebut muncul bermula dari ekspansionisme yang dilakukan pada masa kekaisaran Peter Agung dan kedatangan kaum Cossak, orang-orang yang berlatar belakang militer dan ahli perang dari Rusia, mendorong bangsa Chechen untuk bangkit melawan. Gerakan tersebut sempat padam karena tertangkapnya Imam Mansyur, namun bergejolak kembali pada pertengahan abad XIX dibawah pimpinan Imam Syamil pada tahun 1834 sampai 1859 dengan kekalahan telak dipihak Syamil dan Chechnya akhirnya dikuasai oleh pasukan Rusia dan akhirnya sedikit demi sedikit perjuangan bangsa Chechen mulai surut.

Hampir sepanjang sejarah bangsa Chechen diwarnai dengan darah, apa yang selama ini terjadi disana lebih merupakan berbagai permasalahan yang tidak terselesaikan secara adil, baik saat Chechnya berada di masa Imperium Rusia, masa pemerintahan Uni Soviet, maupun pada masa pemerintahan Federasi Rusia saat ini.

⁴ [Http://www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com), *Suhu Politik di Kaukasus Utara Utara Tetap Membara*, diakses tanggal 28 Oktober 2006

Berbagai macam kebijakan yang dibuat pada tiga masa pemerintahan tersebut tak ada satupun yang menguntungkan bangsa Chechen, tetapi lebih merupakan kebijakan yang sangat diskriminatif. Terlebih dalam upaya mematikan berbagai perjuangan bangsa Chechen, tiga pemerintahan tersebut cenderung memilih jalur-jalur kekerasan dibandingkan jalur perdamaian. Misalnya, pada saat masa Kekaisaran Tsar Peter Agung yang memiliki karakter ekspansif, bangsa Chechen dideportasi ke perbatasan Turki Utsmani. Kebijakan yang sangat merugikan tersebut merupakan hasil persetujuan Tsar dengan Kekaisaran Ottoman, Turki, dimana akibatnya sebagian besar bangsa Chechen terpaksa keluar meninggalkan tanah kelahirannya sendiri sementara tanah-tanah mereka diberikan kepada kaum Cossak, kaum yang merupakan pasukan elite-nya Rusia saat itu.

Tidak hanya itu, ketika revolusi Bolshevick berkobar, Rusia mulai menaklukkan wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai tentara-tentara Putih. Tidak berbeda dengan tentara putih, tentara merah pun melakukan berbagai penindasan dengan menerapkan taktik militer dari metode yang jauh lebih kejam dibandingkan pada masa Tsar guna menundukkan perlawanan penduduk pegunungan tersebut. Dibawah perintah Stalin, pada 23 Februari 1944 tentara merah memasuki Chechnya dan memulai pembersihan etnis. Negeri tersebut dikosongkan dan sekitar 425.000 bangsa Chechen dan Ingushetian dipindahkan ke berbagai wilayah di Asia Tengah, termasuk Siberia guna kerja paksa (gulag)⁵ dan separuh dari jumlah itu meninggal di

⁵ [Http://www.indonesia.tribe.net/kal_sejarah/masehi/desember/11desember.htm](http://www.indonesia.tribe.net/kal_sejarah/masehi/desember/11desember.htm), *Rusia Mulai Menyerang Chechen*, diakses tanggal 28 Oktober 2006

pengungsian. Selain itu, hak-hak beragama mereka pun ditindas, bangsa Chechen yang mayoritas beragama islam tidak diperbolehkan melakukan berbagai bentuk kegiatan agama. Seakan tidak cukup, pemerintah Rusia melakukan eksploitasi sumber daya alam yang ada di bumi Chechnya yang pada dasarnya sangatlah kaya akan hasil tambang, terutama minyak bumi. Namun apa yang diperoleh oleh bangsa Chechen ? nyaris tak ada!

Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 seharusnya membawa angin segar bagi Chechnya untuk lepas dari Rusia. Hampir semua negara-negara bagian bekas Uni Soviet menjadi negara merdeka dan berdaulat. Kebijakan Glasnot dan Perestroika yang diteapkan Mikhael Gorbachev justru memperkuat gerakan-gerakan pemberontakan di banyak republik Uni Soviet. Konflik-konflik yang selama ini tersembunyi, mulai muncul menjadi konflik terbuka, termasuk konflik Chechnya. Namun sayangnya, ketika beberapa negara bagian bekas Uni Soviet mendapat sedikit kemudahan dalam proses pelepasan diri dari Uni Soviet, Chechnya justru dipersulit. Misalnya, Ukraina yang menyatakan kemerdekaannya pada awal Desember 1991, dan meninggalkan ide-ide konfederasi Gorbachev dan mulai membentuk CIS (Commonwealth Independence State) bersama dengan Belarusia. Ataupun Lithuania yang menyatakan kemerdekaannya pada awal Desember 1991 dan bahkan kemerdekaannya mereka di akui oleh Rusia.

kemudahan yang terjadi pada Ukraina dan Lithuania tidak terjadi pada kasus Chechnya. Pernyataan kemerdekaan oleh Dzokhar Dudayev yang memproklamkan berdirinya Republik Icheria pada tanggal 1 November 1991 justru mendapat penolakan yang luar biasa keras dari Rusia. Rezim baru Federasi Rusia tidak menginginkan Chechnya lepas dari Moskow dikarenakan kawasan Kaukasus Utara terlalu vital dan riskan, baik dari aspek sumber daya alam maupun geografis, terlebih jika di situ berdiri negara merdeka yang berdasarkan Islam pula. Perang Chechnya pertama meletus pada tahun 1994 ketika Moskow tidak lagi bisa membendung keinginan Chechnya untuk melepaskan diri dari Federasi Rusia. Awalnya, Boris Yeltsin yang saat itu merupakan pimpinan tertinggi Rusia berlaku lunak dengan mengeluarkan maklumat pada 15 November 1994 yang berisi agar penduduk Chechnya tidak mendukung gerombolan separatis yang dipimpin Dzokhar Dudayev, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat setempat.

Akibatnya, perang pun tak lagi dapat dielakkan, Moskow menyerang Gronzy dan menghancurkan berbagai infra-struktur Chechnya dan konflik berdarah itupun menelan banyak korban jiwa. Dalam perang pertama ini, kekalahan telak dialami oleh Rusia dan akhirnya memilih mundur dari Chechnya. Akibat banyaknya korban yang jatuh dari kalangan sipil, Moskow memutuskan mengambil langkah diplomatis dengan menanda-tangani Perjanjian Kasavyurt pada tahun 1996.⁶ Rusia sepakat untuk memberikan status otonomi kepada Chechnya dan membahas status Chechnya dalam jangka waktu 5 tahun dan untuk sementara waktu, bumi Chechnya mendapat

⁶Fakhrudji, Op.Cit, hal. 228

kedamaian. Namun, ketenangan itu terusik dengan beberapa insiden yang terjadi di Republik tetangga Chechnya, Dagestan yang dilakukan pasukan Basayev memicu perang Chechnya kembali. Entah setan apa yang merasuki Rusia sehingga menjadikan insiden tersebut sebagai alasan untuk kembali menggempur Chechnya. Dan pada Oktober 1999, dengan dalih ketidakmampuan Aslan Maskhadov mengendalikan kelompok Basayev, Perdana Menteri Vladimir Putin kembali menerjunkan lebih dari 80.000 pasukan Rusia untuk kembali ke Chechnya dan berkobarlah Perang Chechnya II sampai sekarang⁷.

Selama berlangsung Perang Chechnya Pertama pada tahun 1994-1996 lebih dari 250.000 orang yang kebanyakan merupakan warga sipil Chechnya tewas terbunuh, sementara dari pihak Rusia, sebanyak 14.500 tentara tewas dalam pertempuran tersebut.⁸ Jumlah tersebut semakin bertambah ketika Perang Chechnya Kedua berkobar, terlebih ketika Putin terpilih sebagai presiden Rusia, permasalahan separatist Chechnya menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pemerintahannya. Putin memberlakukan kebijakan yang luar biasa represif terhadap gerakan separatist Chechnya. Jika pada masa-masa sebelum Putin jalan damai masih bisa diusahakan tetapi pada masa Putin, jalur-jalur tersebut ditutup dan diganti dengan jalur kekerasan. Kebijakan tersebut itu dipertegas dengan pernyataan Putin

⁷ [Http://www.jamestown.org/htm](http://www.jamestown.org/htm), *The Afghanisation of Chechnya* by Peter Brownfeld, diakses tanggal 24 November 2006

⁸ [Http://www.chechnya-mfa.info/paper/en_text.pdf](http://www.chechnya-mfa.info/paper/en_text.pdf), *The Russian-Chechen Tragedy: The Way to Peace and Democracy-Conditional Independence Under International Administration* by Ilyas Akhmadov, diakses tanggal 7 Mei 2007

bahwa “*tidak ada pembicaraan damai dan kompromi bagi separatist Chechnya*”.⁹ Akibatnya, selama perang itu berlangsung sampai sekarang lebih dari 180.000 warga sipil tewas, sementara 350.000 warga kehilangan tempat tinggal. Sementara dari pihak Rusia, lebih dari 3.100 tentara Rusia tewas selama konflik tersebut berlangsung.¹⁰

Kondisi diatas mungkin mengingatkan kita akan pepatah lama “*jika ingin damai, maka bersiaplah berperang (si vis pacem parra bellum)*” yang dilontarkan kaum Realis menjadi sebuah bukti betapa mahalny sebuah perdamaian. Kondisi tersebut juga membenarkan teori Darwinisme yang memandang peperangan sebagai sebuah keharusan keji demi kemajuan peradaban, dimana perang berperan sebagai pelepasan kendali kekuasaan dari pihak yang lemah dan sekarat kepada pihak yang kuat dan dinamis (*survival of the fittest*).¹¹ Ketiadaan hukum di bumi Chechnya semakin menguatkan teori tersebut bahwa satu-satunya hukum yang berlaku disana adalah hukum rimba. Namun selama konflik itu terjadi, entah berapa ratus ribu nyawa bangsa Chechen dan Rusia melayang yang lagi-lagi membuktikan bahwa rakyatlah yang akan dan akan selalu pertama kali menjadi korban.

⁹ [Http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A27550-2004Sep16.html](http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A27550-2004Sep16.html), *A Solution For Chechnya* By S. Frederick Starr, Friday, September 17, 2004; page A27, diakses 24 November 2006,

¹⁰ [Http://www.jamestown.org/htm](http://www.jamestown.org/htm), *Chechnya and Russia: The Significance of the Chechen Problem for Contemporary Russia* by Maciej Falkowski, diakses tanggal 24 November 2006

¹¹ Walter S.Jones, *Logika Hubungan Internasional* (Jakarta:Yudhistira, 1995) hal.190

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, didapat rumusan masalah sebagai berikut, **Apa latar belakang yang menyebabkan Rusia cenderung menerapkan kebijakan represif dalam menghadapi gerakan separatis Chechnya?**

E. Kerangka Teori

1. Model Aktor Rasional

Model aktor rasional didasarkan dari teori pilihan rasional, dimana model tersebut mengambil negara sebagai unit analisis utama, dimana hubungan antar negara bagian atau hubungan internasional sebagai konteks dari analisa tersebut.¹² Menurut Graham T.Allison, dalam model aktor rasional, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan aktor rasional, terutama pemerintah yang monolit, yang dilakukan secara sengaja guna mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹³ Pembuatan keputusan tersebut dipandang sebagai proses intelektual, dimana perilaku pemerintah dianalogikan sebagai perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi yang berusaha menetapkan pilihan dari segala alternatif yang ada. Sehingga analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif tersebut.

¹² [http:// wikipedia.org/wiki/Foreign_policy_analysis](http://wikipedia.org/wiki/Foreign_policy_analysis), *Foreign Policy Analysis*, diakses tanggal 22 Januari 2010

¹³ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta:LP3ES, 1990), hal 234

Dalam model ini, digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif tersebut menggunakan kriteria optimalisasi hasil. Dimana para pembuat keputusan tersebut digambarkan selalu siap melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijakan yang dibuatnya. Mereka juga diasumsikan dapat memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran yang tuntas terhadap semua alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa individu yang rasional dapat menjelaskan secara rinci tujuan-tujuan mereka, pilihan-pilihan yang tersedia seperti pilihan persuasif atau represif, konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi dari alternatif-alternatif tersebut, dan perhitungan untung rugi sebelum membuat keputusan.¹⁴

Runtuhnya Uni Soviet pada awal tahun 1990an menyebabkan negara besar tersebut terpecah-pecah, dimana banyak negara bagian memilih lepas dan mendirikan negara baru yang merdeka, tidak terkecuali Rusia. Rusia yang merupakan bagian paling terbesar dari negara bekas adi daya tersebut, tidak hanya mewarisi kebesaran dua kekuatan, yaitu imperium kekaisaran Rusia dan Uni Soviet, tetapi juga berbagai permasalahan krusial. Selain permasalahan ekonomi dan belum solidnya lembaga-lembaga negara, disintegrasi juga merupakan masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Rusia, dimana salah satunya permasalahan Chechnya.

¹⁴ Foreign Policy Analysis, Op.Cit

Hubungan Rusia - Chechnya memburuk ketika Chechnya yang merupakan bagian dari Federasi Rusia mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat. Pemerintah Rusia jelas menentang keras hal tersebut dan tetap menyatakan bahwa Chechnya merupakan bagian dari Federasi Rusia. Namun, Chechnya yang saat itu dipimpin oleh Dzhokhar Dudayev tetap memproklamkan Chechnya sebagai negara merdeka. Pernyataan Dudayev tersebut jelas membuat marah pemerintah Rusia yang kala itu dipimpin oleh Yeltsin. Yeltsin akhirnya memutuskan menggunakan jalur militer guna mengatasi pemberontakan Chechnya, setelah maklumatnya tidak ditanggapi oleh masyarakat Chechen. Penerjunan ribuan pasukan militer ke kota Grozny yang merupakan ibukota Chechnya pada bulan Agustus 1994 menandai awal mula perang Chechnya yang pertama. Perang yang berlangsung selama 2 tahun tersebut berakhir dengan kekalahan tentara Rusia pada tahun 1996. Pemerintah Rusia dan Chechnya akhirnya sepakat untuk berdamai dan permasalahan status Chechnya ditangguhkan selama 3 tahun.

Chechnya mengalami masa tenang selama tiga tahun sebelum akhirnya perang Chechnya babak kedua kembali meletus pada tahun 1999. Perdana Menteri Rusia saat itu, Vladimir Putin memutuskan untuk kembali menyerang Chechnya setelah mendapat izin dari presiden Yeltsin. Keputusan untuk menyerang Chechnya diambil Putin ketika kelompok pemberontak pimpinan Shamil Basayev menyerang Dagestan dan beberapa kota di Rusia, yaitu Moskow, Buinaksk, dan Volgograd. Putin

akhirnya menerjunkan 80.000 lebih pasukan ke ibukota Chechnya, Gronzy.¹⁵ Rusia akhirnya memperoleh kemenangan ketika Gronzy berhasil di kuasai pada bulan Februari 2000. Meskipun Chechnya berhasil dikuasai kembali, pemerintah Rusia yang saat itu dipimpin Putin tetap melanjutkan operasi militer di Gronzy guna mengikis habis para pemberontak yang masih tersisa yang bersembunyi di daerah pegunungan Kaukasus.

Pada saat tampuk kepemimpinan di pegang oleh Vladimir Putin, permasalahan separatisme yang terjadi di Chechnya menjadi agenda utama dalam pemerintahannya. Baginya, penyelesaian permasalahan Chechnya hanya ada dua, yaitu berdamai atau perang. Jika pilihan damai diambil, keuntungannya adalah anggaran pengeluaran tidak terlalu besar. Kerugiannya, proses tersebut terlalu lama, tidak ada jaminan akan dicapai solusi terbaik bagi kedua belah pihak, terlebih jika mengingat setelah perjanjian Kvasayurt ditandatangani, pembahasan status Chechnya selalu menemui jalan buntu. Selain itu, Maskhadov dinilai Rusia mulai kehilangan kendali terhadap kelompok Shamil Basayev yang tetap bersikukuh agar Chechnya lepas dari Rusia dan terus-menerus melakukan berbagai macam aksi yang pada akhirnya akan membahayakan integrasi Rusia.¹⁶ Putin mengkhawatirkan efek domino yang mungkin terjadi di subyek-subyek Federasi yang ada di wilayah Kaukasus Utara, jika persoalan Chechnya tidak segera diatasi. Disisi lain, sikap ragu-ragu

¹⁵ [Http://www.jamestown.org/htm](http://www.jamestown.org/htm), *The Afghanistanisation of Chechnya* by Peter Brownfeld, diakses tanggal 24 November 2006

¹⁶ <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1999/08/11/0035.html>, *Basayev Pemimpin Pemberontak Islam di Dagestan*, diakses tanggal 12 April 2010

dalam mengatasi persoalan Chechnya hanya akan membuat para pemberontak semakin berani dan itu berarti pelecehan terhadap pemerintahan Putin.

Jika pilihan pembiaran ditempuh, Rusia tidak akan memperoleh keuntungan apa-apa, melainkan situasi di wilayah Chechnya akan semakin kacau dan tidak terkendali, dan nantinya akan menyebabkan ketidakstabilan di wilayah Kaukasus Utara, dan pada akhirnya akan membahayakan integritas dan ekonomi Rusia. Sementara jika pilihan represif diambil, keuntungannya, situasi keamanan di wilayah Kaukasus Utara, khususnya Chechnya akan lebih stabil, yang nantinya akan mempercepat pemulihan ekonomi Rusia, mengingat di wilayah tersebut terdapat ladang dan jalur pipa minyak dan gas yang akan sangat menguntungkan Rusia, terlebih dengan adanya proyek Caspian Oil Pipeline yang sedang digarap Rusia dengan beberapa negara lain. Putin pun menilai militer Rusia sekarang ini sudah jauh lebih baik dan lebih siap, dimana Putin yakin kemenangan akan diperoleh oleh Rusia. Keyakinan Putin tersebut tidak salah, dikarenakan adanya dukungan dari pasukan militer Rusia terhadap kebijakan represif yang diambil Putin.

Kebijakan represif yang diambil Putin terhadap Chechnya jelas mendapat dukungan militer, dikarenakan militer merasa sangat sakit hati atas kekalahan yang mereka derita pada perang Chechnya pertama, terlebih lagi pihak militer menyakini bahwa mereka dikhianati oleh pemerintah yang saat itu dipimpin Yeltsin. Rusia memiliki lebih dari 21 juta personil militer yang didukung dengan peralatan militer yang canggih. Sehingga dengan kesiapan, pengalaman, serta dukungan pasukan dan peralatan tersebut, pasukan Rusia yakin mampu memenangkan peperangan kali ini.

Disisi lain, ketegasan dalam mengatasi permasalahan Chechnya akan meningkatkan legitimasi pemerintahan Putin. Sementara kerugiannya, anggaran yang dikeluarkan akan sangat besar dan kemungkinan adanya kecaman dari dunia internasional. Setelah melakukan perhitungan untung rugi, pilihan represif dipandang lebih tepat guna mengatasi permasalahan Chechnya.

Putin pun menyadari betul kebijakannya menggunakan kekuatan militer guna mengatasi pemberontakan Chechnya akan menimbulkan konsekuensi. Kekalahan yang dialami para pemberontak Chechnya jelas tidak akan menyurutkan semangat perlawanan mereka terhadap pemerintahan Putin. Sehingga guna mengantisipasi hal tersebut, Putin pun memerintahkan operasi Zachtiska (clean-up operation), terlebih setelah banyaknya aksi-aksi bom bunuh diri dan penyanderaan yang dilakukan pemberontak Chechnya. Selain itu, Putin pun memanfaatkan jargon melawan teroris, guna membenarkan operasi militer di Chechnya. Rusia menyakinkan dunia bahwa beberapa pemimpin Chechnya tidak hanya berbahaya bagi Rusia, tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi dunia internasional. Usaha Rusia tersebut dapat dikatakan berhasil, terbukti dari pernyataan Menteri Luar Negeri AS, Collin Powell yang mengatakan bahwa sepak terjang yang dilakukan Shamil Basayev tidak hanya mengrongrong keamanan dan integritas Rusia, tetapi juga mengancam kepentingan dan keamanan dunia, terutama Amerika Serikat. Selain itu, Powell mengidentifikasi dengan tuduhan bahwa gerilyawan Chechnya memiliki hubungan dan memperoleh kucuran dana dari Al-Qaeda. Dengan adanya dugaan tersebut, semakin memudahkan

Rusia dalam menyakinkan masyarakat bahwa tindakan militer terhadap Chechnya adalah tindakan yang tepat.

2. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional seringkali diartikan dengan tujuan dan ambisi suatu negara baik yang menyangkut ekonomi, militer, dan budaya. Para analisis menggunakan kepentingan nasional sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara. Aliran saintifik menggunakan istilah kepentingan nasional untuk dua kegunaan. Pertama, sebagai istilah analisis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri. Dan kedua, sebagai alat tindakan politik, yaitu sebagai sarana untuk membenarkan, mengecam, dan mengusulkan kebijaksanaan.¹⁷ Hans Morgenthau mengatakan bahwa pada dasarnya kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara terhadap negara lainnya¹⁸. Dimana hubungan kekuasaan atau pengendalian itu bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan dan kerjasama.

Arti minimum yang inheren di dalam kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup. Dalam pandangan Morgenthau, kemampuan minimum suatu negara adalah melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara lain. Dalam pengertian yang lebih spesifik, suatu negara harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya (yaitu identitas fisiknya), mempertahankan

¹⁷ Mohtar Mas'ood, Op. Cit, hal.145

¹⁸ Ibid, hal.140-141

rezim ekonomi-politiknya (yaitu identitas politiknya), yang mungkin saja demokratis, otoriter, sosialis atau komunis, dan sebagainya; serta memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik, dan sejarahnya (yaitu identitas kulturalnya).¹⁹ Menurut Morgenthau, dari tujuan-tujuan umum inilah para pemimpin suatu negara bisa mengambil kebijakan-kebijakan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik. Dan kepentingan nasional itulah yang dipakai Rusia dalam mengambil kebijakan garis keras terhadap Chechnya.

Semenjak keruntuhan Uni Soviet, Rusia diwarisi berbagai permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks, mulai dari masalah politik, ekonomi, dan juga disintegrasi. Kondisi ekonomi yang memburuk memaksa Rusia untuk mempertahankan negara-negara bagian bekas Uni Soviet yang masuk sebagai bagian dari Federasi Rusia dan juga menyatukan negara-negara bekas Uni Soviet yang telah merdeka kedalam satu organisasi guna mengamankan posisi dan kepentingan terutama kepentingan politik dan ekonomi Rusia, misalnya dengan terbentuknya CIS (Commonwealth Independence State). Banyaknya konflik-konflik yang terjadi didalam negeri, munculnya berbagai gerakan pemberontakan yang ingin melepaskan diri dari Federasi Rusia semakin memperparah ketidakstabilan didalam negeri Rusia, terutama berimbas besar pada tersendatnya proses pemulihan ekonomi. Dan dalam menjamin kestabilan keamanan negara, berdasarkan Konstitusi Federasi Rusia pasal 80, yang menyatakan:

¹⁹ Ibid

“That the government of Russian Federation be entrusted in accordance with points “d” and “e” of Article 114 of the Constitution of Russian Federation with use all the means available to the state to guarantee national security, legality, the right and freedom of citizens, the preservation of public order, and the fight against crime and with the disarmament of illegal armed formation²⁰

Konstitusi tersebut memperbolehkan negara menggunakan kekuatan militer guna menjamin kepentingan nasional dan kestabilan keamanan nasional. Oleh karenanya dalam menghadapi berbagai macam gerakan pemberontakan yang ada di negara-negara yang menjadi subjek Federasi Rusia, pemerintah Rusia cenderung menggunakan kekuatan militer guna menstabilkan kawasan tersebut, salah satunya terhadap konflik Chechnya.

Konflik Rusia-Chechnya merupakan konflik vertikal pemerintah pusat dengan negara bagian yang secara konstitusional merupakan subjek Federasi Rusia, yang berjuang guna memperoleh kedaulatan, atau setidaknya dalam bentuk hubungan konfederasi. Bangsa Chechen mengatakan bahwa perjuangan memperoleh kedaulatan merupakan proses lanjutan dari perlawanan mereka melawan kolonisasi Rusia pada abad 18 dan 19. Bangsa Chechen tidak pernah menerima bahwa tanah mereka dianeksasi oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1859, setelah perang berdarah selama 30 tahun, mereka tidak pernah menerima integrasi negara mereka sebagai bagian dari Uni Soviet pada tahun 1920. Pejuang Chechnya selalu bertumpu pada Resolusi PBB tahun 1960 yang menjamin kedaulatan negara jajahan dan hak menentukan nasib sendiri. Namun, utusan perdana menteri untuk hubungan Rusia-Chechen, Sergey Shakhrai menyatakan bahwa dalam Federasi Rusia menjamin hak menentukan nasib

²⁰ http://www.amina.com/article/mil_outa.html, *The Chechen Conflict and Russian Security: The Russian Armed Forces Confront Chechnya*, by Timothy L. Thomas, Foreign Military Studies Office, Fort Leavenworth, diakses tanggal 0 Maret 2008

sendiri dengan pengecualian satu bentuk penentuan nasib sendiri yaitu separatisme dari Federasi Rusia.

Konflik antara Rusia dan Chechnya sebenarnya bukanlah konflik baru, melainkan konflik yang telah berlangsung selama ratusan tahun, tetapi mulai menarik pasca runtuhnya Uni Soviet di awal tahun 1990an. Perang Chechnya pertama meletus pada tahun 1991 ketika Chechnya memulai revolusinya pada tanggal 21 Agustus 1991 dan menyatakan kemerdekaannya dari Rusia pada tanggal 6 September 1991. Dzhokhar Dudayev yang merupakan mantan jenderal angkatan udara Rusia diundang dalam Kongres Rakyat Chechen yang diselenggarakan di Estonia, dimana kemudian ia terpilih sebagai pemimpin tertinggi Chechnya dan menyatakan ingin membebaskan Chechnya dari Rusia.

Namun, pemerintah Rusia yang saat itu dipimpin Boris Yeltsin mengatakan bahwa pemilihan tersebut ilegal dan oleh karenanya kepemimpinan Dudayev pun tidak sah. Ketidaksahan kepemimpinan Dudayev semakin ditegaskan Yeltsin dalam pernyataannya dihadapan masyarakat Rusia, dimana ia menyatakan:

“Elections of the Chechen President were held under conditions of essentially martial law and only in certain districts of the then existing Chechen-Ingush Republic. The present leadership was not recognized either by the former legitimate authorities of Chechnya or the federal authorities of the Russian Federation or the world community. The conclusion is that the regime is unlawful and has violated the fundamental requirements of the Constitution of the Russian Federation.”²¹

Yeltsin juga mengatakan bahwa situasi di Chechnya dapat berdampak pada stabilitas Rusia yang berarti ancaman terhadap keamanan negara. Oleh karenanya, guna

²¹ ibid

mengembalikan stabilitas dan hukum di wilayah tersebut, pasukan militer diterjunkan.

Pernyataan Yeltsin tersebut semakin ditegaskan dengan diterjunkan 40.000 tentara militer Rusia ke wilayah Chechnya pasca maklumat yang disampaikannya tidak digubris oleh masyarakat Chechnya. Namun, pemerintah Rusia harus menelan pil pahit saat pasukannya kalah dalam pertempuran dengan pemberontak Chechnya dan terpaksa menarik mundur semua pasukannya dari wilayah Chechnya. Dan perang pertama tersebut berakhir ketika ditandatanganinya perjanjian Kasavyurt yang isinya memberikan otonomi khusus bagi Chechnya dan penangguhan pembahasan status Chechnya selama lima tahun. Namun, ketenangan masyarakat Chechnya hanya berlangsung selama tiga tahun, dan perang Chechnya kedua tidak dapat lagi terelakkan.

Konflik Rusia-Chechnya kembali berkobar saat perdana menteri Rusia yang saat itu di pegang oleh Vladimir Putin menerjunkan ribuan personil militer untuk kembali menggempur Chechnya sebagai jawaban atas maraknya pemboman yang dilakukan oleh pemberontak Chechnya yang dipimpin oleh Shamil Basayev di berbagai wilayah Rusia. Ketika tampuk kepemimpinan Rusia dipegang Putin, permasalahan separatisme yang terjadi di Chechnya menjadi agenda utama dalam pemerintahannya. Baginya, penyelesaian permasalahan Chechnya hanya ada dua, yaitu berdamai atau perang. Putin sadar jika jalan damai yang ditempuh, mau tidak mau Rusia harus rela melepas Chechnya dan itu berarti disintegrasi akan semakin membesar. Dan hal itu jelas tidak diinginkan oleh Putin. Selain itu, sikap ragu-ragu

dalam permasalahan Chechnya hanya akan membuat para pemberontak semakin berani dan itu berarti pelecehan terhadap pemerintahannya yang dianggap tidak becus dalam menyelesaikan masalah Chechnya. Selain itu, Putin memiliki ambisi ingin menegakkan kembali kejayaan Rusia seperti pada masa-masa sebelumnya. Oleh karena itulah, Putin cenderung mengambil kebijakan garis keras dalam mengatasi masalah Chechnya.

Sebagaimana kita ketahui, semenjak masa pemerintahan Yeltsin sampai pemerintahan Putin, keduanya cenderung menerapkan kebijakan represif dalam menghadapi permasalahan Chechnya. Hal itu dikarenakan Rusia memiliki kepentingan yang teramat besar terhadap Chechnya. Chechnya yang terletak di kawasan Kaukasus Utara membuat wilayah tersebut berada pada posisi yang paling strategis bagi kekuatan geopolitik dan ekonomi Rusia. Dari segi geopolitik, lepasnya Chechnya dari Federasi Rusia dikhawatirkan pemerintah Rusia akan memicu pemberontakan besar-besaran di republik-republik lain di Rusia. Dan hal tersebut jelas akan mengancam kestabilan dan keamanan negara.

Dilihat dari segi ekonomi, wilayah Kaukasus Utara amat kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi. Terlebih lagi, Chechnya merupakan jalur pipa minyak utama dari Baku ke Novorossisk dan merupakan penghasil minyak terbesar bagi Rusia. Dimana dari jalur tersebut Rusia memperoleh trafficking fee sebesar 28

miliar USD per tahunnya, Sehingga lepasnya Chechnya jelas akan sangat merugikan bagi Rusia.²²

3. Legitimasi

Legitimasi memiliki kaitan erat dengan wewenang, tetapi memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang. Wewenang atau kewenangan diartikan sebagai hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik (hak memerintah). Sementara legitimasi memiliki arti sebagai penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik.²³ Berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah maka legitimasi dikelompokkan menjadi lima tipe, yaitu:

- ✓ Legitimasi Tradisional, dimana masyarakat memberikan pengakuan dikarenakan pemimpin tersebut merupakan keturunan pemimpin berdarah biru yang dipercaya harus memimpin masyarakat,
- ✓ Legitimasi Ideologi, dimana masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada suatu pemerintahan karena dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi,
- ✓ Legitimasi Kualitas Pribadi, didasarkan pada kualitas yang dimiliki oleh seorang pemimpin,

²² [Http://amina.com/article/oil.html](http://amina.com/article/oil.html), *What Does Russia See in Chcehnya? Oil*, oleh Andrew Meier, diakses tanggal 23 Oktober 2009

²³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta:Gramedia, 1992) hal, 92

- ✓ Legitimasi Prosedural, didasarkan pada pemimpin pemerintahan mendapat kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,
- ✓ Legitimasi Instrumental, didasarkan pada janji-janji yang diberikan pemerintahan akan menjamin kesejahteraan materiil kepada masyarakat.²⁴

Legitimasi dianggap penting bagi suatu pemerintahan dikarenakan legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dan kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan social. Selain itu, legitimasi juga akan membuka kesempatan yang semakin luas bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak ditangani, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan. Dari pengertian diatas, legitimasi dapat dikatakan memiliki kaitan dengan sikap masyarakat terhadap suatu kewenangan. Artinya, apakah masyarakat mau menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan suatu keputusan yang mengikat masyarakat tersebut atau tidak. Jika, masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan mengikat tersebut maka kewenangan tersebut dikategorikan sebagai berlegitimasi. Tetapi, jika masyarakat menolak, maka akan timbul suatu pertentangan dan otoritas revolusioner dapat terwujud.

Hancurnya Uni Soviet pada era tahun 1990an, membawa perubahan yang sangat besar bagi setiap negara-negara bagian Uni Soviet saat itu. Dimana banyak dari negara-negara bagian tersebut memilih melepaskan diri dan menjadi negara baru

²⁴ Ibid, hal.97

yang merdeka, seperti halnya Rusia. Rusia yang merupakan bagian paling besar secara langsung jelas menerima kebesaran bekas negara adidaya tersebut, sekaligus mewarisi berbagai permasalahan-permasalahannya, seperti permasalahan ekonomi dan disintegrasi. Tidak kunjung membaiknya perekonomian Rusia, ditambah dengan banyak pemberontakan yang terjadi di negara bagian, seperti yang terjadi di Chechnya, semakin membuat kondisi dalam negeri Rusia semakin tidak stabil. Dan Rusia semakin berada di ambang kehancuran, saat itulah Vladimir Putin muncul sebagai seorang penyelamat.

Vladimir Putin pada awalnya tidak begitu dikenal oleh masyarakat Rusia, sepak terjangnya dalam dunia politik mulai terlihat pada tahun 1999, ketika ia menjadi Perdana Menteri Rusia dan menjadi acting presiden menggantikan Yeltsin. Namanya semakin dikenal ketika pada tahun 1999, Putin yang saat itu menjabat Perdana Menteri Putin menerjunkan pasukan Rusia ke Gronzy dan mengobarkan perang tuk yang kedua kalinya di Chechnya setelah mendapat persetujuan presiden Yeltsin. Gronzy kembali diserang dengan alasan terganggunya kestabilan keamanan di Rusia akibat berbagai serangan yang dilakukan Shamil Basayev di Dagestan dan jantung Rusia, Moskow. Berbeda dengan perang tahun 1994-1996, pada perang kali ini, kemenangan mutlak diperoleh oleh pasukan Rusia, sekaligus menaikkan pamor Putin di mata masyarakat Rusia dan membuka jalan lebih lebar bagi Putin untuk maju dalam pemilu presiden tahun 2000.

Keberhasilan Putin dalam mengatasi pemberontakan di Chechnya merupakan prestasi yang tidak dapat ditandingi oleh pesaing-pesaing politik Putin. Dukungan

kepadanya pun mengalir dengan sangat deras, tidak hanya dari masyarakat Rusia, tetapi juga dari kalangan anggota eks KGB. Masyarakat Rusia yang sudah sangat geram dengan berbagai aksi brutal yang dilakukan oleh pemberontak Chechnya jelas terpicu dan serta merta memberikan dukungan penuh kepada Putin. Dengan dukungan dari masyarakat Rusia inilah, Putin tampil sebagai pemenang pada pemilu Maret tahun 2000 dengan mengantongi 52,94 % suara dari total suara keseluruhan. Setelah terpilih, Putin mengonsolidasikan kekuasaan secara vertikal. Pada Mei 2000, Putin mengeluarkan dekrit yang membuat 89 wilayah menjadi distrik, yang diawasi dengan orang-orang kepercayaan Putin. Hal ini dimaksudkan guna memperkuat posisi pemerintahan pusat. Putin pun tetap melakukan operasi militer di Chechnya guna menghancurkan seluruh basis-basis pemberontakan dan menangkap para pemberontak Chechnya.

Dukungan terhadap kebijakan Represif Putin terhadap Chechnya terus mendapat dukungan masyarakat Rusia. Terlebih ketika maraknya aksi-aksi bom bunuh diri dan penyanderaan di Teater Moskow dan Beslan yang menewaskan ratusan orang yang tak bersalah. Mayoritas masyarakatnya masih memberikan dukungan kepada Putin. Terbukti pada pemilihan tahun 2004, dengan masih mengusung isu stabilitas keamanan dan terorisme, Putin kembali memenangkan pemilu dengan peroleh suara mencapai 71%.²⁵

²⁵ [Http://wikipedia](http://wikipedia), *Russian Presidential Election in 2004*, diakses tanggal 20 Oktober 2009

Dukungan masyarakat Rusia diberikan kepada Putin dikarenakan Putin dianggap berhasil memulihkan stabilitas keamanan dan ekonomi Rusia. Sebagaimana yang kita tahu, perekonomian Rusia pada awal 1990an mengalami krisis, dan mencapai puncaknya pada tahun 1998, yang menyebabkan ekonomi Rusia terus menerus ambruk. Bahkan krisis ekonomi Rusia dikatakan dunia lebih buruk dari Depresi Besar yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1929-1938. Ekonomi Rusia merosot tajam hingga 40 %, jauh lebih besar dari kemerosotan yang terjadi selama Depresi Besar, dimana kemerosotan ekonomi sekitar 25 % selama lima tahun.²⁶ Perekonomian Rusia mulai membaik dibawah kepemimpinan Putin, dimana pertumbuhan PDB Rusia naik menjadi 7 % pada tahun 2007, dan menjadikan ekonomi Rusia terbesar ke-enam di dunia.

Keberhasilan dalam pemulihan stabilitas keamanan dan ekonomi itulah yang membuat masyarakat Rusia memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan Putin. Masyarakat Rusia merasa negerinya jauh lebih aman dan tertib sejak berada dibawah pemerintahan Putin, dan hal itu pula yang membuat masyarakat Rusia cenderung menutup mata terhadap langkah Putin dalam menumpas gerilyawan Chechnya dengan tangan besi. Kemajuan itu pula yang seakan menutupi gaya kepemimpinan Putin yang dinilai oleh sejumlah kalangan disebut diktator.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang akan dijadikan sebagai sarana acuan merupakan data-data sekunder atau lebih bersifat *library research* (studi kepustakaan). Data-data tersebut

²⁶ Simon Saragih, *Bangkitnya Rusia; Peran Putin dan Eks KGB* (Jakarta: Kompas, 2008) hal.3

diperoleh dari berbagai buku-buku yang berhubungan, melalui media baik cetak maupun elektronik seperti buletin, majalah, surat kabar maupun melalui internet.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi permasalahan yang akan dijelaskan, jangkauan penulisan akan ditekankan dari tahun 1991, ketika perang Chechnya Pertama meletus sampai pada akhir kepemimpinan Vladimir Putin pada tahun 2008. Namun, guna mempermudah penulisan, akan dibahas pula mengenai sejarah dinamika hubungan Rusia-Chechnya dan berbagai peristiwa yang dianggap terkait dengan permasalahan diatas.

H. Hipotesa

Hipotesa adalah dugaan atau jawaban sementara dari permasalahan yang ada. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis menarik hipotesa. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemerintah Rusia menerapkan kebijakan represif dalam menghadapi pemberontakan Chechnya. Faktor – Faktor tersebut antara lain :

- Mempercepat Pemulihan Stabilitas Keamanan di Chechnya
- Penguatan Legitimasi Pemerintahan Putin

I. Sistematika Penulisan

Untuk membahas permasalahan ini secara sistematis, maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam lima bab. Dengan sistematika sebagai berikut:

BAB Pertama, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB Dua, Bab ini menjelaskan mengenai dinamika hubungan Rusia-Chechnya mulai dari masa Imperium Rusia, masa Uni Soviet, dan masa Federasi Rusia. Serta awal mula terjadinya perang antara Rusia dengan Chechnya.

BAB Tiga, Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan represif yang diambil pemerintah Rusia pada era kepemimpinan Putin terhadap Chechnya, seperti kebijakan militer, pembentukan pemerintahan baru, pembatasan liputan di daerah konflik. Serta diuraikan pula beberapa aksi-aksi yang dilakukan oleh gerilyawan Chechnya, seperti aksi bom bunuh diri dan penyanderaan.

BAB Empat, Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pemerintah Rusia mengambil kebijakan represif dalam mengatasi gerakan separatis Chechnya.

BAB Lima, Bab ini berisi rangkuman atau kesimpulan pembahasan penelitian ini serta penutup dari penelitian ini.